

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EDDY GUNAWAN**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **280566**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.700.968.224

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 575.771.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 451.076.374
3. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 430.788.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 437.226.240
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 458.606.610
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1970 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 207.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/143 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 85.000.000

1. MOTOR, HOINDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 4.607.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 963.387.426



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.753.962.650
III. HUTANG	Rp.	168.815.503
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.585.147.147

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.